

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2003, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Press, Jakarta.
- Ashiddiqie, Jimly, 2005, *Konsitusi dan Konstitusionalisme*, Konstitusi Press, Jakarta.
- Astawa, I Gde Pantja dan Suprin Na'a, 2012, *Ilmu Negara dan Teori Negara*, PT Refika Meditama, Bandung.
- Busroh, Abu Daud, 1990, *Ilmu Negara*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Cohen, Morris L. dan Kent C. Olson, 1992, *Legal Research*, West Publishing Co., Minnesota.
- Giddens, Anthony, 1984, *The Constitution of Society*, Polity Press, Cambridge University Press.
- Huda, Ni'matul, 2014, *Desentralisasi Asimetris dalam NKRI Kajian terhadap Daerah Istimewa, Daerah Khusus dan Otonomi Khusus*, Nusa Media, Bandung.
- _____, 2009, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Nusa Media, Bandung.
- Manan, Bagir, 1996, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, PSH FH UII, Yogyakarta.
- Laski, Harold J., 1947, *The State in Theory and Practice*, The Viking Press, New York.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Santoso, Agus, 2013, *Menyikap Tabir Otonomi Daerah di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Soehino, 2000, *Ilmu Negara*, Liberty, Yogyakarta.
- Soekanto, Soerjono, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Sri Sumantri dan Martosoewignjo, 1981, *Pengantar Perbandingan Antara Hukum Tata Negara*, Rajawali, Jakarta.
- Strong, C.F., 1996, *Modern Political Constitution: An Introduction to the Comparative Study of Their History and Existing Form*, The English Book Society and Sidgwick dan Jackson Limited, London.
- Suriasumantri, Jujur S., 1986, *Ilmu dalam Perspektif Moral*, Alumni, Bandung.
- Waluyo, Bambang, 2002, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.

_____, 1959, *Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945*, Jajasan Prapantja, Jakarta.

Yamin, Muh., 1995, *Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI)*, Sekretariat Negara Republik Indonesia, Jakarta.

B. Artikel Jurnal, dan Majalah

Chien, Shiuh-Shen, "Economic Freedom and Political Control in Post-Mao China: A Perspective of Upward Accountability and Asymmetric Decentralization", *Asian Journal of Political Science*, Vol. 18, No. 1, April 2010.

Dickovick, J. Tyler, "Centralism and Decentralization in Unitary States: A Comparative Analysis of Peru and Senegal", *Journal of Public and International Affairs*, Vol.14/Spring, 2003.

Furniss, Norman, "Northern Ireland as a Case Study of Decentralization in Unitary States", *World Politics*, Vol. 27, No.3, April 1975.

Jati, Wasisto Raharjo, "Inkonsistensi Paradigma Otonomi Daerah di Indonesia: Dilema Sentralisasi atau Desentralisasi", *Jurnal Konstitusi*, Vol. IX, No. 4, Desember 2012.

Jaweng, Robert Endi, "Kritik terhadap Desentralisasi Asimetris di Indonesia", *Analisis CSIS Politik Kekerabatan di Indonesia*, Vol. 40, No. 2, Juni 2011.

Waley, Paul, "Review of Cities, Autonomy, and Decentralization in Japan", *Pacific Affairs*, Vol. 83, No. 3, September 2010.

Wasistiono, Sadu, "Kajian Hubungan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah", *Jurnal Administrasi Pemerintahan Daerah*, Vol. I, No.2, 2004.

Young, James T., "Administrative Centralization and Decentralization in France", *The Annals of the American Academy of Political and Social Science*, Vol. 11, No. 1, Januari 1898.

C. Makalah, Pidato

Bin, Hao, "Distribution of Powers between Central Governments and Sub-national Governments", *Makalah*, dipresentasikan dalam Forum Committee of Experts on Public Administration PBB di New York pada 16-20 April 2011.

Lay, Cornelis, "Desentralisasi Asimetris Bagi Indonesia", *Makalah*, dipresentasikan dalam Seminar Nasional Menata Ulang Desentralisasi dari Persepektif Daerah, Yogyakarta, 25 Januari 2010.

D. Hasil Penelitian

Anwar Shah dan Theresa Thompson, 2004, "Implementing Decentralized Local Governance: A Treacherous Road with Potholes, Detours and Road Closures", *World Bank Policy Research Working Paper*, World Bank, Washington D.C.

Pradhani, Sartika Intaning, 2014, *Legal Analysis on Special Distinct Provinces in the Unitary State Republic of Indonesia*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Shun'ichi, Furukawa, 2004, "Decentralization in Japan", *Japan Center for International Exchange*, Tokyo.

E. Artikel Internet

Ashiddiqie, Jimly "Konsep Negara Hukum Indonesia", http://www.jimly.com/makalah/namafile/135/Konsep_Negara_Hukum_Indonesia.pdf, diakses 9 November 2015.

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, "Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah", <http://www.kemendagri.go.id/news/2012/04/03/keterangan-pemerintah-atas-rancangan-undang-undang-tentang-pemerintahan-daerah>, diakses 19 Oktober 2015.

Wicaksono, Dian Agung, "Asymmetrical Decentralization in Indonesia: The Challenge of Institutional Change Delivery Social Welfare in Indonesia", https://www.academia.edu/9850248/Asymmetrical_Decentralization_in_Indonesia_The_Challenge_of_Institutional_Change_to_Delivery_Social_Welfare_in_Indonesia, diakses 9 November 2015.

F. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar 1945 sebelum amandemen.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 tentang Peraturan Kedudukan Komite Nasional Daerah.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Penetapan Aturan-aturan Pokok Mengenai Pemerintahan Sendiri di Daerah-Daerah yang Berhak Mengatur dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2777).

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037).
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839).
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4151).
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437).
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633).
- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4744).
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4884).
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339).
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587).
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 233, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656).
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678).

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 278, Tambahan Lembaran Nomor 5767).

Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 24 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bantaeng (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 24 Tahun 2007).

Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 4 tahun 2008).

Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Bintan (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Nomor 5 Tahun 2008).

Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10).

G. Dokumen Lainnya

Law of the People's Republic of China on Regional National Autonomy (english version)

Montevideo Convention on Rights and Duties of States.

Risalah Rapat Rancangan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah.

The Constitution of China (english version).

The Basic law of The Hong Kong Special Administrative Region of the People's Republic of China (english version).

The Constitution of Japan (english version).

The Basic law of The Macao Special Administrative Region of the People's Republic of China (english version).